



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

**EVALUASI RENCANA KERJA
TRIWULAN IV
(OKTOBER – DESEMBER 2021)**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya jugalah sehingga Laporan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Triwulan IV (Keempat) Tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dapat diselesaikan dengan baik.

Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2021 adalah untuk menilai dan mengevaluasi terhadap pencapaian target-target rencana program dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Data yang digunakan dalam Evaluasi Rencana Kerja adalah data primer yang berasal dari isian formulir evaluasi hasil RENJA PD Tahun 2021.

Sinjai, 31 Desember 2021

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,



Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I/IV.b
Nip. 19641214 198903 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
1.1	Latar Belakang.....	BAB I-1
BAB II	HASIL CAPAIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021 TRIWULAN IV (KEEMPAT).....	BAB II-1
2.1	Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam RENJA dan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai	BAB II-1
2.2	Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program/Kegiatan Renja PD.....	BAB II-6
2.3	Kendala Yang Dihadapi.....	BAB II-33
BAB III	PENUTUP.....	BAB III-1
3.1	Kesimpulan.....	BAB III-1
3.2	Rekomendasi.....	BAB III-1
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

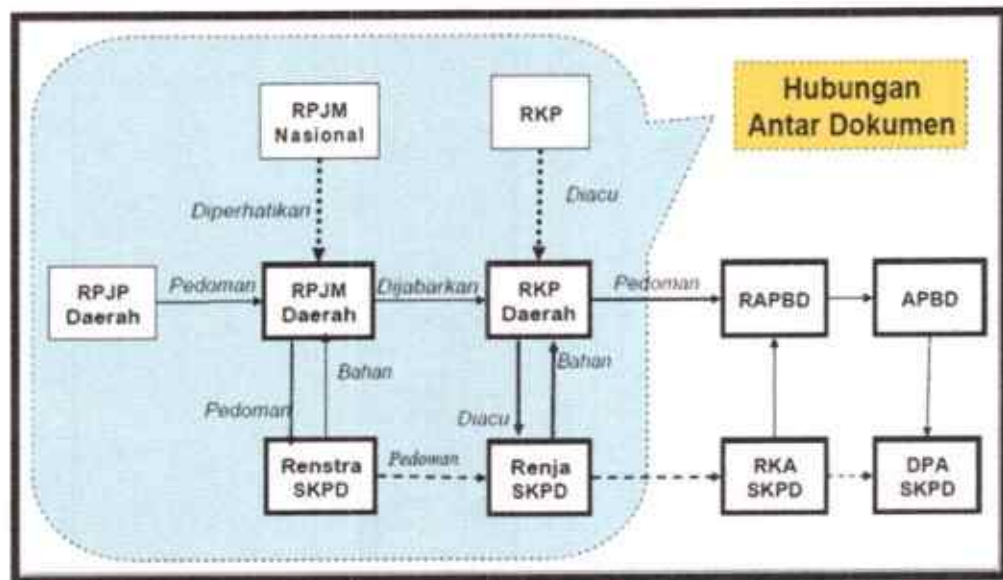
1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin bahwa Rencana Kerja (RENJA) telah menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah (PD) dengan baik, maka perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD dilakukan setiap Triwulan sesuai dengan aliran dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan. Evaluasi RENJA PD sangat perlu untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan tahun berjalan. Hasil evaluasi selanjutnya dipakai sebagai bahan perbaikan program yang sedang berjalan dan dasar penyusunan RENJA PD tahun berikutnya.

Dalam kepemimpinan yang baik bukan semata-mata mengejar berapa uang yang diperoleh untuk kegiatan pembangunan, tetapi sejauh mana lembaga dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang dibebankan kepadanya sehingga terwujud pemerintahan yang akuntabel. Akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam pertanggungjawaban keuangan menitikberatkan pada konsep akuntabilitas pada program/kegiatan yang strategis serta tidak mengesampingkan pentingnya pertanggungjawaban keuangan pada program/kegiatan non strategis. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hubungan berbagai dokumen dalam mencapai tujuan sasaran PD dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Hubungan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Terkait
Pentingnya Evaluasi



Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini disusun untuk

menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai. Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian tugas pokok dan fungsi pada kepala dinas, kepala bidang dan kepala seksi dalam Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2016, maka dilakukan perubahan dan penyesuaian, dengan pertimbangan itu maka ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, berikut Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai adalah :

1.1.1 Tugas Pokok

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok antara lain :

1. melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah, dan
2. melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

1.1.2 Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas pokok di atas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
3. pengoordinasian kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
5. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai memiliki Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Dinas;
- b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Sumber Daya Air:
 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- d. Bidang Bina Marga :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan;
 2. Seksi Pembangunan Kebinamargaan; dan
 3. Seksi Preservasi Kebinamargaan.
- e. Bidang Cipta Karya :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciaptakarya;
 2. Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum; dan
 3. Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman.

f. Bidang Jasa Konstruksi :

1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan
3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi.

g. Bidang Penataan Ruang :

1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; dan
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

f. Fungsional.

Tabel 1.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Kode			Urusan Wajib	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3			4	5	6	7
					Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			134.883.344.664,00
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset Perangkat Daerah				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah berkinerja baik dan sangat baik	100 %	7.992.012.301
		1	03	01		Persentase temuan berdasarkan LHP	100 %	
						Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah	100 %	
		1	03	01		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	5 Dokumen	103.239,100,00
		1	03	01	Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	15.164.184,00
						Jumlah Laporan monitoring program dan kegiatan SKPD	12 Laporan	28.448.966,00
		1	03	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen keuangan tepat waktu	100 %	6.004.848.284,00

			1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	83 Orang	5.804.848.284,00
			1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan Administrasi Keuangan	12 Laporan	50.000.000,00
			1	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban SKPD	12 Laporan	150.000.000,00
			1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	196.314.200,00
			1	03	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	12 Laporan	166.278.200,00
			1	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undang	Jumlah pelaksanaan sosialisasi perundang-undangan yang disosialisasikan	0 Kali	0,00
			1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan/Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 Orang	30.036.000,00
			1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	100 %	434.428.200,00
			1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 Jenis	4.946.400,00
			1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang digunakan dalam setahun	12 Laporan	53.832.800,00
			1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Media/Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan dalam setahun	15 Jenis	23.330.000,00

									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 Laporan	352.319.000,00
									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	134.500.000,00
									Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	7 Unit	134.500.000,00
									Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	0 Unit	0,00
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	413.941,967
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian jasa telepon	40.278 Menit	4.027.800,00
										Volume pemakaian air	6.161,40 m ³	31.607.982,00
										Daya Pemakaian Listrik	134.533 VA	194.400.185,00
										Jumlah pemakaian jasa internet	10 Mbps	16.572.000,00
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Non ASN yang disediakan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dalam setahun	107 Orang	17.334.000
										Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor yang disediakan dalam setahun	9 Orang	150.000.000
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang/Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	100 %	661.127.400

			1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik dan siap pakai	40 Unit	201.747.300
									Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang mendapatkan pengesahan kelengkapan	40 Unit	15.650.000
			1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah dan jenis kendaraan alat besar dalam kondisi baik dan siap pakai	24 Unit	350.530.100
									Jumlah kendaraan alat besar yang mendapatkan pengesahan kelengkapan	24 Unit	56.730.000
			1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	28 Unit	20.000.000
			1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang Terpelihara Rutin/berkala	0 Unit	0
			1	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara	27 Unit	16.470.000
Meningkatkan indeks layanan infrastruktur	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	1	03	02				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	73,56%	21.429.693.000
		1	03	02	2.01			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam (satu) Daerah/Kabupaten	Jumlah lokasi sungai/danau/waduk/embung yang ditangani	1 Lokasi	2.990.000.000

			1	03	02	2.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi	1 Dokumen	50.000.000
			1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air terbangun	0 Unit	2.940.000.000
			1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada Di Kewenangan Kabupaten	18.026 Meter	18.439.693.000
			1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Perencanaan Jaringan Irigasi	1 Dokumen	292.825.000
			1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Irigasi Kabupaten yang Ditingkatkan/Direhab	17.376 Meter	17.735.868.000
			1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi dan Bangunan Air yang Terpelihara	32 D.I	411.000.000
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum dan layanan sanitasi		1	03	03			PROGRAM PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, perkotaa dan pedesaan	100 %	13.126.571.072
			1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan, peningkatan, perluasan, dan pemeliharaan system penyediaan air minum	1.352 Unit	13.126.571.072
			1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan dan perluasan air minum	1 Dokumen	90.000.000

		1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Miumum	1.351 Unit	4.986.571.072
		1	03	03	2.01	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	1 Unit	8.050.000.000
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum dan layanan sanitasi	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN AIR SISTEM LIMBAH	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	100 %	9.333.453.000
		1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi	802 Unit	9.333.453.000
		1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	802 Unit	9.241.453.000
		1	03	05	2.01	13	Penyediaan Sarana dan Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana dan Prasarana Limbah yang Tersedia	3 Unit	92.000.000
Meningkatkan Indeks layanan infrastruktur	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	81,43%	150.000.000
		1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota dalam kondisi baik	200 Meter	150.000.000
		1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Master Plan Drainase	1 Dokumen	0

		1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Permukiman yang Terpelihara	200 Meter	150.000.000
Meningkatkan indeks layanan infrastruktur	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Bangunan Gedung (Kecuali Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret Sederhana) yang Laik Fungsi	98.70 %	12.915.160.201
		1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung di wilayah kabupaten/kota dalam kondisi baik serta kesesuaian tertib administrasi tata bangunan	100 %	12.915.160.201
							Penyelenggaraan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah laporan Kegiatan Pengawasan dan Penerbitan Bangunan di Kabupaten Sinjai dalam setahun	2 Laporan	82.000.000
							Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Pemerintahan Kab. Sinjai yang Direhab	1 Unit	696.576.400
								Jumlah Bangunan Gedung yang Dihibahkan	3 Unit	1.606.923.600
								Jumlah sarana infrastruktur peribadatan yang terbangun	1 Unit	10.489.660.201

		1	03	08	2.01	03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah HSBGN	Dokumen	Teknis	1 Dokumen	40.000,000
Meningkatkan indeks layanan infrastruktur	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan jalan kabupaten			0,5379	69.485.932.650
		1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik			647,18 Km	69.485.932.650
		1	03	10	2.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah pemeliharaan PJU			568 Buah	1.426.279.400
		1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang Dikerjakan			28,79 Km	66.952.910.700
		1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara			7 Km	356.742.550
		1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun dan Direhabilitasi Berat			1 Buah	600.000,000
		1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara			10 Buah	150.000.000
Meningkatkan indeks layanan infrastruktur	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator /teknisi/analisis memiliki kompetensi			12,14 %	115.780.000
		1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat			356 Orang	106.364.350
		1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja Terampil			2 Kali	106.364.350
		1	03	11	2.03		Penertiban Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah BUJK yang memiliki izin usaha jasa konstruksi			20 BUJK	9.415.650

		1	03	11	2.03	02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penertiban Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah rekomendasi IUJK	20 BUJK	9,415,650
Meningkatkan indeks layanan infrastruktur	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan Terhadap RT/RW	100 %	334.742.440
		1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah RTRW/RRTR disusun/ditetapkan dokumen yang	0 Dokumen	164.746.660
		1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Lokasi Pemeliharaan RTH Taman Kota di Kabupaten Sinjai	3 Lokasi	164.746,660
		1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang	0 Kecamatan	0
		1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan informasi pemanfaatan ruang untuk inestasi dan pembangunan daerah	100 %	99.997,830
		1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kawasan yang Dipetakan Secara Detail	1 Dokumen	99.997,830
		1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan terhadap pemanfaatan ruang	100 %	69.997,950
		1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Kesesuaian Ruang	12 Rekomendasi	69.997,950

Sumber: DPPA TA 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai

BAB II

HASIL CAPAIAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021 TRIWULAN IV

2.1 Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam RENJA dan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

Perbandingan antara program/kegiatan dalam RENJA dan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada tabel 2.1 :

Tabel 2.1
Perbandingan RENJA dan RENSTRA Tahun 2021

Kode					Urusan Wajib	Jumlah Kegiatan		Ket
						RENJA	RENSTRA	
1					2	3	4	5
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	√	√	
1	03	01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	√	√	
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	√	√	
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat	√	√	
1	03	01	2.01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	√	√	
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√	√	
1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	√	√	
1	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	√	√	
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	√	√	
1	03	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	√	√	
1	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undang	√	√	
1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan/Perundang-Undangan	√	√	
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	√	√	
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	√	√	

1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	√	√	
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	√	√	
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√	√	
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	√	√	
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	√	√	
1	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	√	√	
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	√	
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	√	√	
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	√	√	
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang/Urusan Pemerintahan Daerah	√	√	
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	√	√	
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	√	√	
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	√	√	
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	√	√	
1	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	√	√	
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	√	√	
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam (satu) Daerah/Kabupaten	√	√	
1	03	02	2.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	√	√	
1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	√	√	

1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	√	√	
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	√	√	
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	√	√	
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	√	√	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	√	√	
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	√	√	
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM	√	√	
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			
1	03	03	2.01	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	√	√	
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	√	√	
1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	√	√	
1	03	05	2.01	13	Penyediaan Sarana dan Pengangkutan Lumpur Tinja	√	√	
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	√	√	
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	√	√	
1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	√	√	
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	√	√	
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	√	√	
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	√	√	
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	√	√	

1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	√	√	
1	03	08	2.01	03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	√	√	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	√	√	
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	√	√	
1	03	10	2.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	√	√	
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	√	√	
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	√	√	
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	√	√	
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	√	√	
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	√	√	
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	√	√	
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	√	√	
1	03	11	2.03		Penertiban Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	√	√	
1	03	11	2.03	02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penertiban Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	√	√	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	√	√	
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	√	√	
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	√	√	
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	√	√	
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	√	√	
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	√	√	
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	√	√	
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	√	√	

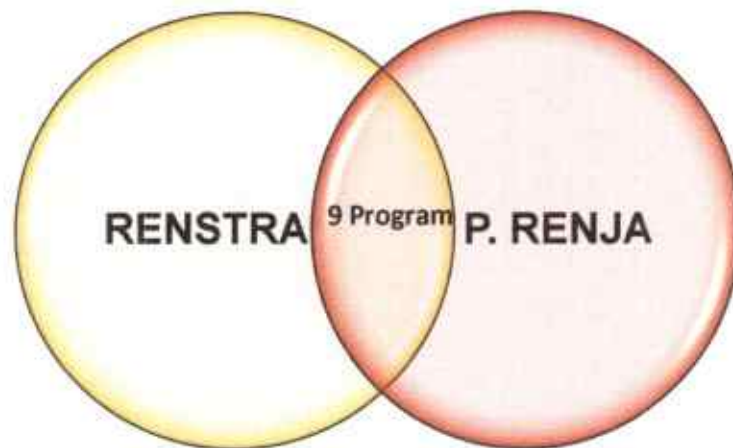
Sumber :DPPA Tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan perbandingan antara program/kegiatan dalam RENJA dan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.Tidak ada program dalam RENJA yang berbeda dengan RENSTRA dengan demikian dapat dikatakan bahwa

keselarasan program RENJA dan RENSTRA sudah mencapai 100%, artinya tidak ada program RENJA yang tidak sesuai dari program RENSTRA seperti yang terlihat dalam diagram di bawah ini :

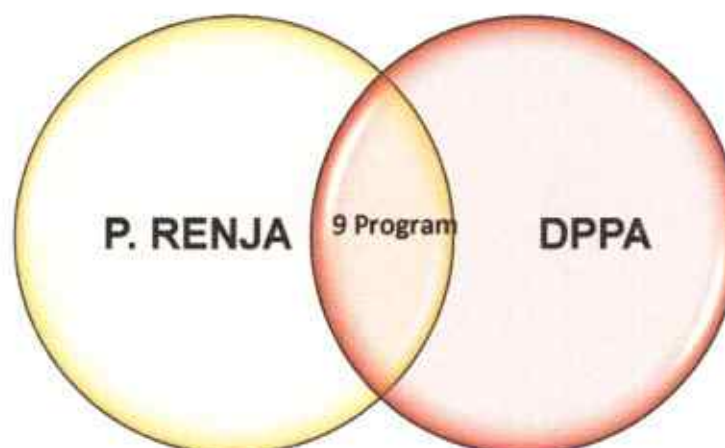
Diagram 1 : Kesesuaian Jumlah Program RENJA Tahun 2021 dengan Jumlah Program RENSTRA Tahun 2018 – 2023.

DPPA



Jumlah Program dalam Perubahan RENJA Tahun 2021 sebanyak 9 Program. Jumlah program dalam DPPA Tahun 2021 sebanyak 9 Program. Tidak ada program dalam RENJA yang berbeda dengan program DPPA. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keselarasan program RENJA dengan DPPA sudah sesuai mencapai 100 %, artinya Tidak ada program RENJA yang tidak sesuai dari program DPPA Tahun 2021

Diagram 2 : Irisan Kesesuaian Jumlah Program DPPA dengan Program Perubahan RENJA Tahun 2021



2.2. Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan RENJA PD, Sebagai Berikut :

Capaian target kinerja dan penyerapan anggaran program/kegiatan RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai sesuai dengan tabel terlampir yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan indikator kinerja Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah pada tahun 2021 menargetkan 100% dan terealisasi sebesar 98,08%.

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 103.239.100 dengan indikator kinerja yaitu jumlah Perencanaan SKPD dengan target 5 dokumen. Pada triwulan Keempat target kinerja 5 dokumen, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 103.239.100 atau 100%, Realisasi kinerja sudah terealisasi sesuai target sedangkan realisasi anggaran dibawah dari

rencana yaitu sebesar Rp. 101.844.100. atau 98,65%. ini disebabkan karena adanya belanja jasa tenaga administrasi yang tidak terbayar.

b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.613.150 dengan dua indikator kinerja yaitu Jumlah Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 1 Laporan dan Jumlah Laporan Monitoring Program dan Kegiatan SKPD dengan target 12 Laporan. Pada triwulan keempat target kinerja jumlah laporan monitoring program dan kegiatan SKPD 12 laporan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 43.613.150 atau 100%. Realisasi Kinerja terealisasi sesuai target sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 42.193.150 .atau 96,74%, ini disebabkan karena adanya belanja jasa tenaga administrasi yang tidak terbayar.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.808.848.284 dengan indikator kinerja yaitu Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan dengan target 83 orang. Pada triwulan keempat target kinerja jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan sebanyak 83 orang dengan rencana anggaran sebesar Rp. 5.808.848.284 atau 100%. Realisasi Kinerja dibawah dari target yaitu jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan sebanyak 70 Orang, begitupun dengan penyerapan anggaran di bawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 5.741.492.477 atau 98,91%. (Realisasi kinerja dan anggaran sesuai dengan banyaknya pegawai sampai akhir triwulan IV).

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000,000 dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dengan target 12 Laporan. Pada triwulan keempat target kinerja sebanyak 12 Laporan dengan rencana anggaran Rp. 50.000.000,-atau 100% Realisasi Kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 48.680.000 atau 97,36%.

c. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

Kegiatan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000,000 dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Laporan Pertanggungjawaban SKPD dengan target 12 Laporan. Pada triwulan keempat target kinerja sebanyak 12 Laporan dengan rencana anggaran Rp. 150.000.000 atau 100%. Realisasi Kinerja sesuai target yang telah ditetapkan sedangkan penyerapan anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 148.680.000,-atau 99,12%.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.

Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 166.278.200 dengan indikator kinerja yaitu Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun dengan target 12 laporan. Pada triwulan keempat target kinerja selama 12 bulan dengan rencana anggaran Rp. 166.278.200,- atau 100%. Realisasi Kinerja sesuai target yang telah ditetapkan, sedangkan penyerapan anggaran dibawah dari rencana yaitu

sebesar Rp. 162.725.200,- atau 97,86%, ini disebabkan karena adanya belanja jasa tenaga administrasi yang tidak terbayar (Tenaga honorer keluar dari kantor)

b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0.00 dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Perundang-undangan yang Disosialisasikan dengan target 1 Kali untuk 50 Orang. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya serta menindaklanjuti Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, dengan dasar pertimbangan tersebut kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tidak dilaksanakan sehingga pagu anggaran menyesuaikan atau Rp. 0.

c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan pada perubahan anggaran mengalami penurunan anggaran begitupun dengan target kinerja menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Alokasi anggaran perubahan sebesar Rp. 30.036.000,- dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan target 5 orang, ini disebabkan karena

adanya Penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Pada triwulan keempat realisasi kinerja dibawah dari rencana yang sudah ditetapkan yaitu Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sebanyak 3 orang, begitupun dengan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 10.011.600,- atau 33,33%.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.946,400 dengan indikator kinerja yaitu Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dengan target kinerja 5 Jenis.. Realisasi kinerja sampai triwulan keempat sesuai dengan target begitupun dengan realisasi anggarannya.

b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 54.184.800,- dengan indikator kinerja yaitu Jumlah laporan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang digunakan dalam setahun, dengan target 12 laporan. Pada triwulan kedua terjadi perubahan pagu anggaran yaitu sebesar Rp. 53.832.800 karena adanya Penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Tetapi tidak mempengaruhi target kinerja. Realisasi pada triwulan keempat sesuai target yang sudah ditetapkan, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp.

52.832.800,- atau 98,14%. (anggaran yang terealisasi sesuai dengan kebutuhan).

c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.330.000 dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Media/Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan dalam setahun sebanyak 15 jenis. Realisasi pada triwulan keempat sesuai target yang telah ditentukan, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 21.190.000,- atau 90,83%. (Realisasi anggaran sesuai dengan kebutuhan).

d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 412.766.000,- dengan indikator kinerja yaitu Jumlah laporan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Daerah dengan target 12 laporan. Pada triwulan kedua terjadi perubahan pagu anggaran yaitu sebesar Rp. 313.094.000 karena adanya Penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 tetapi tidak mempengaruhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan. Pada perubahan APBD alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini mengalami kenaikan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 352.319.000,-. Realisasi anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 343.873.713,- atau 97,60%. (Realisasi sesuai kebutuhan).

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ;

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 168.091.200,- dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan target 15 unit. Karena adanya Penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 target kinerja maupun pagu anggaran menyesuaikan, sehingga pada triwulan kedua target kinerja yang ditetapkan yaitu Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan target 4 Unit dengan rencana anggaran sebesar Rp. 86.000.000. Pada Perubahan APBD alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini mengalami kenaikan dengan pagu anggaran sebesar 134.500.000,- begitupun dengan target kinerja yang ditetapkan yaitu Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sebanyak 8 Unit. Realisasi pada triwulan keempat sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 134.349.000,- atau 97,60%. Sisa anggaran merupakan selisih nilai pagu dengan nilai yang terkontrak..

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya..

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.820.000,- dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan target 2 unit. Pada triwulan kedua kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak dilaksanakan sehingga pagu anggaran menyesuaikan atau Rp. 0, ini disebabkan karena

adanya Penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019,

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 246.607,967 dengan adanya perubahan Renstra, indicator sub kegiatan menyesuaikan, dimana indicator dari kegiatan ini terdiri atas 4 Indikator, yaitu :1. Jumlah pemakaian jasa telepon dengan target 40.278 menit, 2. Volume pemakaian air dengan target 6.161,40 m³, 3. Daya Pemakaian Listrik dengan target 134.533 VA, dan 4. Jumlah pemakaian jasa internet dengan target 10 Mbps. Sampai triwulan keempat realisasi kinerja untuk indicator:

1. Jumlah pemakaian jasa telepon dengan target 40.278 menit terealisasi sebesar 4.148,40, rendahnya capaian disebabkan karena hanya beban telepon yang dibayarkan.
2. Volume pemakaian air dengan target 6.161,40 m³ terealisasi sebesar 1.200 m³, rendahnya capaian disebabkan karena adanya penganggaran untuk rekening air di taman karampuang tidak terpakai karena menggunakan sumur bor.
3. Daya pemakaian listrik dengan target 134.533 VA terealisasi sebesar 82.363 VA, rendahnya capaian karena penganggaran pemakaian listrik di taman karampuang masih melekat di lampu jalan disebabkan karena adanya beberapa instalasi yang rusak.

Realisasi anggaran sebesar Rp.140.037.957,- atau 56,79%.

Realisasi anggaran sesuai dengan kebutuhan.

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 167.334,000 dengan dua indikator kinerja yaitu Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor yang disediakan dalam setahun target 9 orang dan Jumlah Non ASN yang disediakan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dalam setahun dengan target 107 orang. Pada triwulan keempat realisasi kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 165.901.920,- atau 99,14, hal ini disebabkan karena adanya perubahan harga satuan luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan;

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 217.397.300 dengan dua indikator kinerja yaitu 1. Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik dan Siap Pakai dengan target 40 unit dan 2. Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapatkan Pengesahan Kelengkapan dengan target 40 unit. Realisasi sampai triwulan keempat untuk indikator:

1. Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik dan Siap Pakai dengan target 40 unit hanya terealisasi sebanyak 32 unit, rendahnya capaian ini disebabkan karena ada beberapa penanggungjawab kendaraan tidak melakukan pengajuan perbaikan kendaraan.

2. Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang mendapatkan Pengesahan Kelengkapan dengan target 40 unit terealisasi sesuai target.

Realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 160.250.407,- atau 73,71%.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar.

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 407.260,100 dengan dua indikator kinerja yaitu 1. Jumlah dan Jenis Kendaraan Alat Besar dalam Kondisi Baik dan Siap Pakai dengan target 24 unit dan 2. Jumlah Kendaraan Alat Besar yang mendapatkan Pengesahan Kelengkapan dengan target 24 Unit. Realisasi sampai triwulan keempat untuk masing-masing indikator terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan realisasi anggaran di bawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 371.638.946,- atau 91,25%.

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000,000 dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara dengan target 28 Unit. Realisasi kinerja sampai triwulan keempat sesuai target yang telah ditetapkan begitupun dengan realisasi anggarannya.

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.999.800,- dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala dengan target 1 Unit. Pada triwulan kedua kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi

Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya tidak dilaksanakan sehingga pagu anggaran menyesuaikan atau Rp. 0, ini disebabkan karena adanya Penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.470,000 dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara dengan target 27 Unit. Realisasi kinerja sampai triwulan keempat sudah terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan, begitupun dengan realisasi anggarannya.

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan indikator kinerja Persentase Irigasi kabupaten Dalam Kondisi Baik. Indikator Kinerja Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik pada Tahun 2021 ditargetkan sebesar 73,56% sedangkan realisasi yang diperoleh pada tahun tersebut diatas dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 73,60% sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100,05%. Realisasi Tahun 2021 masih dibawah pencapaian dibandingkan dengan target di akhir periode Renstra Dinas.

1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;

a. Penyusunan Pola dan Rencana SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota.

Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000,000 dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi dengan

target 1 Dokumen. Realisasi kinerja sampai triwulan keempat sudah terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan, begitupun dengan realisasi anggaran.

b. Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya.

Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.940.000.000 dengan indikator kinerja Jumlah embung dan penampung air terbangun 0 unit. Pada sub kegiatan ini tidak menargetkan unit pembangunan embung dan penampung air lainnya karena baru dalam tahap pengadaan tanah untuk pembangunan. Realisasi kinerja belum terukur karena realisasi baru pada tahap penentuan harga tanah oleh Jasa Appraisal (Penilai Tanah dan Bangunan Beserta Kelengkapannya). Realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 114.462.600,- atau 3,89%.

2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;

a. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa.

Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 292.825.000 dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan Jaringan Irigasi dengan target 1 Dokumen. Realisasi kinerja sampai triwulan keempat sudah terealisasi sesuai target, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 292.810.000,- atau 99,99%, sisa anggaran merupakan selisih nilai pagu dengan nilai yang terkontrak.

b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan.

Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.735.868.000 dengan

indikator kinerja yaitu Panjang Irigasi yang Ditingkatkan/Direhab dengan target 17.376 Meter. Realisasi kinerja sampai triwulan keempat melampaui target yang telah ditetapkan yaitu panjang irigasi yang ditingkatkan/direhab sepanjang 18.712 meter atau terealisasi sebesar 107,69%, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.184.124.500,- atau 96,89%, sisa anggaran merupakan selisih nilai pagu dengan nilai yang terkontrak.

c. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 552.000.000,- dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Daerah Irigasi dan Bangunan Air yang Terpelihara dengan target 32 DI. Karena adanya Penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Pada triwulan kedua pagu anggaran pada sub kegiatan mengalami pengurangan anggaran, sehingga pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 411.000.000 tetapi tidak mempengaruhi dari target kinerja yang sudah ditetapkan sebelumnya. Realisasi kinerja sampai triwulan keempat sudah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 410.988.349,- atau 100%. Selisih nilai realisasi dengan nilai pagu karena adanya sisa anggaran pada rekening belanja pemeliharaan. (realisasi sesuai kebutuhan).

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ;

Indikator Kinerja Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/ air minum yang aman pada Tahun 2021 ditargetkan sebesar 100%, sedangkan realisasi yang diperoleh pada tahun tersebut dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 84,64%,

sehingga capaian yang diperoleh sebesar 84,84%. Realisasi Tahun 2021 masih dibawah pencapaian dibandingkan dengan target di akhir periode Renstra Dinas. Capaian kinerja berdasarkan indikator Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/ air minum yang aman terhadap jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Sinjai, baru mencapai 84,64%, namun pemenuhan akses air bersih haruslah disertai dengan peningkatan cakupan kinerja pelayanan air minum (SPM PU). Defenisi air minum sendiri adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Pemerintah terus berupaya keras mewujudkan 100% akses Air Minum aman dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat . Target tersebut dibutuhkan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, PDAM, BUMN, Badan Usaha dan masyarakat. Program 100-0-100 ini merupakan sebuah program menuju pemerintahan target tiga sektor antara lain pemenuhan 100% akses air minum, pengurangan kawasan kumuh menjadi 0% dan pemenuhan 100% akses sanitasi layak

Air Minum merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, untuk itu sejalan dengan pentingnya peranan dan fungsi dari air minum perlu direncanakan suatu sistem penyediaan air minum (SPAM).

Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota;

a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM.

Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 90.000.000 dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan dan Perluasan Air Minum dengan target 1 Dokumen. Realisasi sampai triwulan keempat sudah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 85.607.500,- atau 95,12%. Sisa anggaran merupakan biaya penunjang dari kegiatan tersebut yang tidak cairkan.

b. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan.

Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.834.770.900,- 4.986.571.072 dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dengan target 1.352 Unit. Pada Perubahan DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pagu sub kegiatan menyesuaikan di aplikasi krisna sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 4.832.070.900. Pada Perubahan APBD pagu anggaran sub kegiatan bertambah karena adanya sisa pagu anggaran dana DAK tahun sebelumnya sebesar Rp. 154.500.172,- sehingga pagu anggaran pada sub kegiatan ini menjadi sebesar Rp. 4.986.571.072,-. Realisasi kinerja sampai triwulan keempat sudah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 4.880.046.768,- atau

97,86%, sisa anggaran merupakan selisih nilai pagu dengan nilai yang terkontrak.

c. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan.

Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.000.000.000 dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dengan target 1 Unit. Pada Perubahan Kedua DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada sub kegiatan ini terjadi penambahan item rekening belanja jasa konsultasi lainnya-jasa konsultasi lingkungan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000, sehingga pagu total sub kegiatan menjadi Rp. 8.050.000.000. Realisasi kinerja sampai triwulan keempat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 7.966.683.853,- atau 98,97%. Sisa anggaran merupakan selisih nilai pagu dengan nilai yang terkontrak.

4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah :

Indikator Kinerja Persentase penduduk berakses layanan air limbah domestik pada Tahun 2021 ditargetkan sebesar 100%, sedangkan realisasi yang diperoleh pada tahun tersebut dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 89,00%, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 89,00%. Realisasi Tahun 2021 masih dibawah pencapaian dibandingkan dengan target di akhir periode Renstra Dinas

Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan air limbah domestik yang ramah lingkungan, sehingga tercapai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan yang lebih baik dan sehat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa pengelolaan air limbah termasuk dalam urusan

wajib pemerintah daerah dan merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 juga menyatakan pencapaian universal akses sanitasi pada tahun 2019.

Menjawab tantangan universal sanitasi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Pemerintah Daerah berkomitmen untuk meningkatkan akses air limbah domestik berupa pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota yang meliputi sistem pengelolaan air limbah setempat (on site system) sistem pengelolaan air limbah terpusat (off site system) dan pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja

Penyelenggaraan Pengelolaan air Limbah domestik bertujuan untuk meningkatkan akses layanan air limbah domestik yang ramah lingkungan, sehingga tercapai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungannya yang lebih baik dan sehat.

Secara umum, Sanitasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mewujudkan dan menjamin kondisi lingkungan (terutama lingkungan Fisik, tanah, air dan udara) yang memenuhi syarat kesehatan. Sanitasi memberikan banyak manfaat bagi lingkungan manusia, khususnya lingkungan Fisik : tanah, air dan udara.

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman.

Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.241.453.000 dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi dengan target 802 Unit. Sub kegiatan ini bersumber dari DAK yang terdiri dari 19 lokasi kegiatan dengan 2 tema

yaitu; 1. Tematik Kemiskinan dan Tematik Stunting. Pelaksanaan kegiatan ini didukung dengan tenaga fasilitator lapangan yang mendampingi KSM dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Kegiatan ini bersifat swakelola yang dilaksanakan oleh masyarakat sendiri. Realisasi kinerja sampai triwulan keempat sudah terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 9.240.943.000,- atau 99,99.

b. Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja.

Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 92.000.000 dengan indikator kinerja yaitu Jumlah sarana dan Prasarana Air Limbah yang tersedia dengan target 3 Unit. Sampai triwulan keempat realisasi kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu yaitu Jumlah sarana dan Prasarana Air Limbah yang tersedia 3 Unit ($25/25 \times 100\% = 100\%$), sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 90.240.000,- atau 98,09%, ini disebabkan karena adanya belanja jasa tenaga administrasi yang tidak terbayar.

5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem drainase dengan indikator kinerja Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat pada tahun 2021 menargetkan sebesar 81,43% dan terealisasi sesuai target.

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota;

a. Penyusunan Rencana. Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan.

Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 673.209.753,- dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Dokumen Master Plain Drainase dengan target 1 Dokumen. Karena adanya Penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, dengan dasar pertimbangan tersebut kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan tidak dilaksanakan sehingga pagu anggaran menyesuaikan atau Rp. 0.

b. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase.

Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000 dengan indikator kinerja yaitu Panjang Saluran Drainase Permukiman yang Direhab dengan target 200 Meter. Karena adanya Penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Pada triwulan kedua pagu anggaran pada sub kegiatan mengalami pengurangan anggaran, sehingga pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 100.000.000. Pada perubahan APBD pada sub kegiatan ini ada penambahan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-, sehingga pagu anggaran kembali sama dengan pagu pokok yaitu sebesar Rp. 150.000.000,-. Realisasi kinerja pada triwulan keempat sudah terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 149.926.000,- atau 99,95%.

6. Program Penataan Bangunan Gedung'

Proram Penataan bangunan Gedung dengan indicator kinerja Rasio Bangunan Gedung (Kecuali Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret Sederhana) yang Laik Fungsi pada tahun 2021 menargetkan sebesar 98,70%, dan terealisasi sebesar 98,43% sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 99,73%.

1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;

a. Penyelenggaraan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG.

Kegiatan Penyelenggaraan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Gedung, serta Implementasi SIMBG dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 74.000.000,- dengan indikator kinerja yaitu Terwujudnya Pelayanan Pengelolaan Izin Mendirikan Bangunan dengan target 12 Laporan. Karena adanya Penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, dengan dasar pertimbangan tersebut sub kegiatan Penyelenggaraan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG tidak dilaksanakan sehingga pagu anggaran menyesuaikan atau Rp. 0. Pada perubahan anggaran pada sub kegiatan ini kembali dianggarkan untuk penyusunan Perda sebesar Rp. 82.000.000,- dengan target kinerja Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Bangunan Di Kabupaten Sinjai dalam setahun sebanyak 2 Laporan. Realisasi kinerja hanya 1 laporan tentang pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan Perda, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 52.974.170,- atau 64,60%.

b. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan dua indikator kinerja yaitu Jumlah Bangunan Gedung Kantor Pemerintah Kab. Sinjai yang Direhab dengan target 2 Unit. Dan Jumlah Bangunan Gedung yang Dihibahkan dengan target 3 Unit. Pada perubahan pertama DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Sinjai menganggarkan belanja modal bangunan gedung tempat ibadah yang mana pelaksanaan fisiknya pada tahun sebelumnya yang berlanjut sampai tahun 2021 (Kontrak Bersyarat). Pada tahun 2021 DPA pokok belum dianggarkan karena pada tahun 2020 kegiatan tersebut dilaksanakan di akhir tahun dengan sumber dana dari Bantuan Keuangan dari Provinsi yang mana penggunaan dana tersebut mempunyai syarat bilamana pekerjaan fisik diakhir tahun tidak mencapai 70%, maka dana tidak akan turun sebesar 100%, dan diawal pelaksanaan pekerjaan fisik agak lambat progress kemajuan fisik tidak sesuai dengan schedule nanti diakhir tahun pelaksanaan bisa memenuhi yang dipersyaratkan dan pada saat itu sudah dilakukan penetapan APBD untuk tahun 2021, dan adanya keterbatasan DAU. Anggaran pada Sub Kegiatan ini mengalami perubahan dengan bertambahnya paket pekerjaan Islamic center sehingga pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 12.314.370.201,-. Pada perubahan APBD pada sub kegiatan ini menganggarkan kembali pengawasan Islamic center dan lanjutan pembangunan 2 (dua) Rujab Wakil DPRD sehingga pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 12.793.160.201,-.

Realisasi kinerja pada triwulan keempat terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.787.458.918,- atau 99,96%, sisa anggaran merupakan selisih nilai pagu dengan nilai yang terkontrak.

c. Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota

Kegiatan Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000 dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Dokumen Teknis HSBGN dengan target 1 Dokumen. Realisasi kinerja pada triwulan keempat sesuai dengan target yang telah ditetapkan begitupun dengan realisasi anggarannya.

7. Program Penyelenggaraan Jalan :

Program Penyelenggaraan Jalan dengan Indikator Rasio kemantapan jalan kabupaten. Indikator Kinerja Rasio kemantapan jalan pada Tahun 2021 ditargetkan sebesar 0,5379 angka atau 53,79%, realisasi yang diperoleh pada tahun tersebut melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 0,5694 angka atau 56,94%, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 105,86%. Realisasi Tahun 2021 masih dibawah pencapaian dibandingkan dengan target di akhir periode Renstra Dinas

1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota;

a. Pengelolaan Leger Jalan

Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 444.099.400,- dengan indikator kinerja yaitu Jumlah pemeliharaan PJU dengan target 200 Buah. Pada perubahan APBD ada penambahan anggaran untuk belanja modal dan penambahan belanja alat listrik dan elektronik, sehingga pagu anggaran sebesar Rp. 1.426.279.400,-. Dengan target Jumlah pemeliharaan PJU 568 Buah. Realisasi kinerja pada triwulan keempat dibawah dari target yaitu Jumlah pemeliharaan PJU 352 Unit, hal ini disebabkan

karena adanya belanja alat listrik yang tidak terealisasi, begitupun dengan realisasi anggarannya dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 1.398.072.037,- atau 98,02%.

b. Rekonstruksi Jalan

Kegiatan Rekonstruksi Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44.014.502.800,- yang mana sumber dana pada sub kegiatan ini terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) Tahap II dan Tahap III, serta DID Tahun 2021, dengan indikator kinerja yaitu Panjang Jalan yang Dikerjakan dengan target 28,79 Km. Adanya upaya pemerintah pusat mengimbau pemda agar dana insentif daerah (DID) juga dapat digunakan minimal 30% untuk bidang kesehatan dan perlindungan sosial di daerah, sehingga pagu yang bersumber dari DID tahun 2021 menyesuaikan. disamping itu adanya penganggaran untuk paket pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya yang dananya bersumber dari dana pinjaman sehingga pagu anggaran setelah dilakukan perubahan DPA sebesar Rp. 66.935.090.700. Pada perubahan anggaran pada sub kegiatan ini ada penambahan anggaran untuk belanja jasa tenaga administrasi yang mana sebelumnya menggunakan DID yaitu sebesar Rp. 17.800.000,- sehingga pagu anggaran sebesar Rp. 66.952.910.700,-. Realisasi kinerja sampai triwulan keempat dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu Panjang Jalan yang Dikerjakan 22,725 Km ini disebabkan karena adanya prefocusing anggaran, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 62.508.052.186,- atau 93,36%. Rendahnya realisasi anggaran disebabkan karena adanya kegiatan fisik yang belum dibayarkan untuk pekerjaan 100% fisik dan biaya pemeliharaan.

c. Pemeliharaan Rutin Jalan

Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000,- dengan indikator kinerja yaitu Panjang Jalan yang Dipelihara dengan target 7 km. Karena adanya Penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 maka dilakukan pengurangan anggaran pada sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan sehingga pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 356.742.550. Realisasi kinerja pada triwulan keempat melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu Panjang Jalan yang Dipelihara sepanjang 13 Km, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 356.356.222,- atau 99,89%.

d. Pembangunan Jembatan.

Kegiatan Pembangunan Jembatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000 dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Jembatan yang Dibangun dan Direhabilitasi Berat dengan target 1 Buah. Realisasi kinerja sampai triwulan keempat sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 599.854.000,- atau 99,98%. Sisa anggaran merupakan selisih nilai pagu dengan nilai yang terkontrak.

e. Pemeliharaan Rutin Jembatan

Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000 dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Jembatan yang Dipelihara dengan target 10 Buah. Karena adanya Penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 maka dilakukan pengurangan anggaran pada sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan sehingga pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 150.000.000. Realisasi kinerja sampai

triwulan keempat melampaui target yang telah ditetapkan yaitu Jumlah Jembatan yang Dipelihara sebanyak 48 Buah atau $(48/10 \times 100\%) = 480\%$, hal ini disebabkan karena adanya perubahan penanganan pemeliharaan jembatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 149.972.830,- atau 99,98%.

8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi.

Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan indikator kinerja Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi dengan target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2021 adalah sebesar 12,14%, dan terealisasi dibawah dari target yaitu sebesar 9,33%, hal ini disebabkan karena target yang direncanakan tenaga terampil yang lulus sertifikasi sebanyak 100 orang tetapi terealisasi hanya 96 orang dan Kebutuhan tenaga kerja konstruksi untuk pembangunan infrastruktur sangat besar setiap tahunnya untuk membantu program pembangunan infrastruktur.

1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi;

a. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 137.159.350,- dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja Terampil dengan target 2 Kali (100 TK). Pada perubahan APBD, pagu anggaran sebesar Rp. 106.364.350,-, perubahan anggaran disebabkan karena adanya kerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar dimana ada beberapa item belanja dibiayai oleh Balai. Realisasi kinerja sampai triwulan keempat sudah terealisasi sesuai target pelaksanaan tapi realisasi tenaga kerja yang lulus bersertifikat dibawah dari target yaitu dari 100 tenaga kerja yang mengikuti tes hanya 98 yang lulus, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 106.364.350,- atau 100%.

2. **Penertiban Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil);**

a. **Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penertiban Rekomendasi Teknis IUJK Nasional**

Kegiatan Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penertiban Rekomendasi Teknis IUJK Nasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.947.800,- 9.415.650 dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Rekomendasi IUJK dengan target 20 BUJK. Karena telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko, sehingga tidak ada lagi Izin Usaha Jasa Konstruksi, karena sub sector Jasa Konstruksi hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Sertifikat Badan Usaha atau Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi), dengan dasar itu maka untuk triwulan kedua target kinerja pada sub kegiatan ini ditiadakan. Pada perubahan APBD, pagu anggaran sebesar Rp. 9.415.650,- menyesuaikan aturan yang berlaku tentang pemberian rekomendasi IUJK. Realisasi kinerja sampai triwulan keempat tidak sesuai target yang telah ditetapkan ini disebabkan karena target pada dokumen perencanaan tidak menyesuaikan dengan adanya aturan yang berlaku, sedangkan realisasi anggaran sesuai dengan rencana yaitu sebesar Rp. 9.415.650,- atau 100%.

9. **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.**

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan indikator kinerja Ketaatan terhadap RTRW sebesar 100% dan terealisasi sesuai rencana.

1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota;

a. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang

Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 164.746.660 dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Lokasi Pemeliharaan RTH Taman Kota di Kabupaten Sinjai dengan target 3 Lokasi Taman Kota. Realisasi kinerja sampai triwulan keempat sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 162.312.680,- atau 98,52%.

b. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44.963.140,- dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Rencana Tata Ruang dengan target 9 Kecamatan. Karena adanya Penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, dengan dasar pertimbangan tersebut sub kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang tidak dilaksanakan sehingga pagu anggaran menyesuaikan atau Rp. 0.

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota;

a. Sistem Informasi Penataan Ruang

Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.997.830 dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Dokumen Kawasan yang Dipetakan Secara Detail dengan target 1 Dokumen. Realisasi kinerja sampai triwulan keempat sudah terealisasi sesuai target yang telah

ditetapkan, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 99.802.830,- atau 99,80%. Hal ini disebabkan karena adanya selisih nilai pagu dengan nilai yang terkontrak.

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota;



a. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Kegiatan Pelaksanaan Penataan Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 69.997.950 dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan target 12 Rekomendasi. Realisasi kinerja sampai triwulan keempat melampaui target yang telah ditetapkan yaitu Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 14 rekomendasi, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 60.426.350,- atau 86,33%, hal ini disebabkan karena rapat yang sering dilakukan dengan tenaga ahli melalui aplikasi zoom atau TKPRD menemui langsung tenaga ahli di Makassar dalam rangka menyelesaikan persoalan yang muncul pada pemohon mengenai kesesuaian penataan ruang.

1.1 Kendala Yang Dihadapi

Rendahnya capaian kinerja dan anggaran sampai dengan Triwulan IV (Keempat) disebabkan masih adanya kegiatan yang tidak terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini:

-  sumber daya manusia yang tidak merata.
-  Proses pelaksanaan, dimana waktu di awal pelaksanaan kegiatan dengan rencana awal tidak sesuai (pelaksanaan kegiatannya terlambat).

- 🚩 Seringnya keterlambatan dalam hal pengumpulan data dan juga ketidakseragaman data .
- 🚩 Koordinasi antar stakeholder

BAB III

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2021 sampai dengan Triwulan IV (Keempat) masih jauh dari sempurna, ini disebabkan karena adanya beberapa penentuan target indicator pada sub kegiatan yang tidak tepat.

Adapun total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program yaitu :

📊 Capaian Kinerja = 99,08 % (ST)

📊 Capaian Anggaran = 93,91 % (ST)

Dapat dilihat bahwa capaian kinerja sampai pada triwulan IV Sangat Tinggi, begitupun dengan capaian anggaran, Realisasi indikator dengan capaian sangat tinggi diperoleh dengan dukungan realisasi keuangan yang juga sangat tinggi pada masing-masing program setiap urusan.

Dengan tersusunnya Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2021 sampai dengan Triwulan IV (Keempat) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2021 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di tahun ini.

1.2 Rekomendasi

Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2021 sampai dengan Triwulan IV (Keempat) ini sangat bermanfaat untuk mengetahui tingkat capaian kinerja yang dicapai sampai Triwulan IV (Keempat), sehingga untuk kedepannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat kepada sasaran untuk meningkatkan capaian kinerja.

Adapun Rekomendasi yang perlu dilaksanakan untuk Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2021 yaitu:

- ☀️ Penyusun program dan kegiatan diharapkan mengacu pada rencana strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) yang sudah ditetapkan;
 - ☀️ Perlu adanya komitmen SKPD dalam penyusunan evaluasi hasil Renja SKPD Tahun 2021 dan melaporkan kepada BAPPEDA setiap triwulan sesuai dengan format evaluasi renja SKPD;
 - ☀️ SKPD diharapkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin atas capaian kinerja dan penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan DPA SKPD;
 - ☀️ Meningkatkan intensitas forum diskusi antar bidang untuk lebih memahami tugas pokok dan fungsi, meningkatkan sinergitas program kegiatan antar sector, peningkatan kualitas SDM, serta penyamaan mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan maupun evaluasi pelaksanaan fisik serta realisasi keuangan.
 - ☀️ Dalam merumuskan rencana anggaran perlu memperhatikan program/kegiatan prioritas, terutama yang telah tertuang dalam indikator kinerja utama sehingga menjadi tolak ukur teknis pencapaian keberhasilan kegiatan pada tahun mendatang
- Demikian beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan pada Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2021

Sinjai, 31 Desember 2021

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,



Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I/IV.b
Nip. 19641214 198903 1 010

Kabupaten :
Diplo
Periode Berisi : 2000
: 2001
: 2002
: 2003
: 2004
: 2005
: 2006
: 2007
: 2008
: 2009
: 2010
: 2011
: 2012
: 2013
: 2014
: 2015
: 2016
: 2017
: 2018
: 2019
: 2020
: 2021
: 2022
: 2023
: 2024
: 2025
: 2026
: 2027
: 2028
: 2029
: 2030
: 2031
: 2032
: 2033
: 2034
: 2035
: 2036
: 2037
: 2038
: 2039
: 2040
: 2041
: 2042
: 2043
: 2044
: 2045
: 2046
: 2047
: 2048
: 2049
: 2050
: 2051
: 2052
: 2053
: 2054
: 2055
: 2056
: 2057
: 2058
: 2059
: 2060
: 2061
: 2062
: 2063
: 2064
: 2065
: 2066
: 2067
: 2068
: 2069
: 2070
: 2071
: 2072
: 2073
: 2074
: 2075
: 2076
: 2077
: 2078
: 2079
: 2080
: 2081
: 2082
: 2083
: 2084
: 2085
: 2086
: 2087
: 2088
: 2089
: 2090
: 2091
: 2092
: 2093
: 2094
: 2095
: 2096
: 2097
: 2098
: 2099
: 2100
: 2101
: 2102
: 2103
: 2104
: 2105
: 2106
: 2107
: 2108
: 2109
: 2110
: 2111
: 2112
: 2113
: 2114
: 2115
: 2116
: 2117
: 2118
: 2119
: 2120
: 2121
: 2122
: 2123
: 2124
: 2125
: 2126
: 2127
: 2128
: 2129
: 2130
: 2131
: 2132
: 2133
: 2134
: 2135
: 2136
: 2137
: 2138
: 2139
: 2140
: 2141
: 2142
: 2143
: 2144
: 2145
: 2146
: 2147
: 2148
: 2149
: 2150
: 2151
: 2152
: 2153
: 2154
: 2155
: 2156
: 2157
: 2158
: 2159
: 2160
: 2161
: 2162
: 2163
: 2164
: 2165
: 2166
: 2167
: 2168
: 2169
: 2170
: 2171
: 2172
: 2173
: 2174
: 2175
: 2176
: 2177
: 2178
: 2179
: 2180
: 2181
: 2182
: 2183
: 2184
: 2185
: 2186
: 2187
: 2188
: 2189
: 2190
: 2191
: 2192
: 2193
: 2194
: 2195
: 2196
: 2197
: 2198
: 2199
: 2200
: 2201
: 2202
: 2203
: 2204
: 2205
: 2206
: 2207
: 2208
: 2209
: 2210
: 2211
: 2212
: 2213
: 2214
: 2215
: 2216
: 2217
: 2218
: 2219
: 2220
: 2221
: 2222
: 2223
: 2224
: 2225
: 2226
: 2227
: 2228
: 2229
: 2230
: 2231
: 2232
: 2233
: 2234
: 2235
: 2236
: 2237
: 2238
: 2239
: 2240
: 2241
: 2242
: 2243
: 2244
: 2245
: 2246
: 2247
: 2248
: 2249
: 2250
: 2251
: 2252
: 2253
: 2254
: 2255
: 2256
: 2257
: 2258
: 2259
: 2260
: 2261
: 2262
: 2263
: 2264
: 2265
: 2266
: 2267
: 2268
: 2269
: 2270
: 2271
: 2272
: 2273
: 2274
: 2275
: 2276
: 2277
: 2278
: 2279
: 2280
: 2281
: 2282
: 2283
: 2284
: 2285
: 2286
: 2287
: 2288
: 2289
: 2290
: 2291
: 2292
: 2293
: 2294
: 2295
: 2296
: 2297
: 2298
: 2299
: 2300
: 2301
: 2302
: 2303
: 2304
: 2305
: 2306
: 2307
: 2308
: 2309
: 2310
: 2311
: 2312
: 2313
: 2314
: 2315
: 2316
: 2317
: 2318
: 2319
: 2320
: 2321
: 2322
: 2323
: 2324
: 2325
: 2326
: 2327
: 2328
: 2329
: 2330
: 2331
: 2332
: 2333
: 2334
: 2335
: 2336
: 2337
: 2338
: 2339
: 2340
: 2341
: 2342
: 2343
: 2344
: 2345
: 2346
: 2347
: 2348
: 2349
: 2350
: 2351
: 2352
: 2353
: 2354
: 2355
: 2356
: 2357
: 2358
: 2359
: 2360
: 2361
: 2362
: 2363
: 2364
: 2365
: 2366
: 2367
: 2368
: 2369
: 2370
: 2371
: 2372
: 2373
: 2374
: 2375
: 2376
: 2377
: 2378
: 2379
: 2380
: 2381
: 2382
: 2383
: 2384
: 2385
: 2386
: 2387
: 2388
: 2389
: 2390
: 2391
: 2392
: 2393
: 2394
: 2395
: 2396
: 2397
: 2398
: 2399
: 2400
: 2401
: 2402
: 2403
: 2404
: 2405
: 2406
: 2407
: 2408
: 2409
: 2410
: 2411
: 2412
: 2413
: 2414
: 2415
: 2416
: 2417
: 2418
: 2419
: 2420
: 2421
: 2422
: 2423
: 2424
: 2425
: 2426
: 2427
: 2428
: 2429
: 2430
: 2431
: 2432
: 2433
: 2434
: 2435
: 2436
: 2437
: 2438
: 2439
: 2440
: 2441
: 2442
: 2443
: 2444
: 2445
: 2446
: 2447
: 2448
: 2449
: 2450
: 2451
: 2452
: 2453
: 2454
: 2455
: 2456
: 2457
: 2458
: 2459
: 2460
: 2461
: 2462
: 2463
: 2464
: 2465
: 2466
: 2467
: 2468
: 2469
: 2470
: 2471
: 2472
: 2473
: 2474
: 2475
: 2476
: 2477
: 2478
: 2479
: 2480
: 2481
: 2482
: 2483
: 2484
: 2485
: 2486
: 2487
: 2488
: 2489
: 2490
: 2491
: 2492
: 2493
: 2494
: 2495
: 2496
: 2497
: 2498
: 2499
: 2500
: 2501
: 2502
: 2503
: 2504
: 2505
: 2506
: 2507
: 2508
: 2509

[illegible]

[illegible]



LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ALAMAT : JALAN LAMATTI NO. 1 TELP. (0482) 21649 - 21490 SINJAI 92613

Sinjai, 30 Desember 2021

Nomor	: 000/06.508/DPUPR/XU/2021.	Kepada	YTH. 1. Sekretaris Dinas PUPR;
Sifat	: Penting		2. Para Kepala Bidang Dinas PUPR;
Lampiran	: -		3. Para Kepala Seksi Dinas PUPR;
Perihal	: <u>Evaluasi Rencana Aksi dan</u>		4. Para Kasubbag. Dinas PUPR;
	<u>Rencana Kerja Triwulan IV Tahun</u>		5. Staf Dinas PUPR;
	<u>Anggaran 2021</u>	Di-	
		Tempat	

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini diminta agar menyampaikan data laporan kinerja berdasarkan Rencana Aksi dan Rencana Kerja untuk capaian sampai Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 pada Subbagian Program paling lambat tanggal 3 Januari 2022.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,


Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP.196412141989031010





PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ALAMAT : JALAN LAMATTI NO. 1 TELP. (0482) 21040 - 21490 SINJAI 92613

Sinjai, 30 Desember 2021

Kepada

Nomor : 800 / 06-510 / DPUPR / XII / 2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rapat Evaluasi Rencana Aksi dan
Rencana Kerja Triwulan IV Tahun
2021

YTH. 1. Sekretaris Dinas PUPR;
2. Para Kepala Bidang Dinas PUPR;
3. Para Kepala Seksi Dinas PUPR;
4. Para Kasubbag. Dinas PUPR;
5. Staf Dinas PUPR;
Di-

Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka akan dilakukan rapat evaluasi kinerja lingkup Dinas.

Sehubungan hal tersebut disampaikan kepada Saudara(i) agar menghadiri rapat yang dimaksud yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Rabu, 5 Januari 2022
Waktu : 09.30 wita s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sinjai

Demikian undangan ini disampaikan, dan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,


Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP.19641214 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ALAMAT : JALAN LAMATTI NO. 1 TELP. (0482) 21048 - 21488 SINJAI 92013

DAFTAR HADIR RAPAT

Tempat : Ruang Rapat DPUPR
Tanggal/Bulan/Thn : 5-01-2022
Perihal : Rapat Evaluasi Rencana Aksi dan Rencana Kerja Triwulan IV Tahun 2021

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	A. Taufiq	Kadis	1.
2.	NAZARUDDIN TAMA	SEK	2.
3.	Edy Hafid	Kasubag. Umpeg	3.
4.	Hj. Nuraribah	Kabid. Jakum	4.
5.	ILHAM	KASD P. RASB	5.
6.	Makmun Wahid	Staf	6.
7.	Sultan Asyraf	Kasi pelak. P. R	7.
8.	M. Ridwan Juy	Kasi Pelak SDA	8.
9.	HAERUDDIN	KASI OP SDA	9.
10.	H. ABD. ASIS	Kasi Per.C. SDA	10.
11.	Herman Hatta	Jabfun	11.
12.	ROSMAWATI	Kabid. KKM	12.
13.	Weni Oktaviana	Bendahara pengeluaran	13.
14.	Rustam Efendi	Kasi pemb. BM	14.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ALAMAT : JALAN LAMATTI NO. 1 TELP. (0482) 21040 - 21400 SINJAI 92013

15.	AZHAR	Kari PLP	15.	
16.	MURFAH	KASI PENGAWASAN	16.	
17.	BADRI HATTA	Umur SDA	17.	
18.			18.	
19.			19.	
20.			20.	
21.			21.	
22.			22.	
23.			23.	
24.			24.	
25.			25.	
26.			26.	
27.			27.	
28.			28.	

Sinjai,

Notulis,

Nurhermawati, ST
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19750729 200604 2 022

Mengetahui,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang Kabupaten Sinjai

Ir. Andi Taufiq Saleh, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ALAMAT : JALAN LAMATTI NO. 1 TELP. (0482) 21040 - 21400 SINJAI 92613

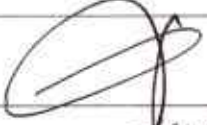
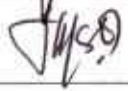
DAFTAR HADIR RAPAT

Tempat : Ruang Rapat DPUPR
Tanggal/Bulan/Thn : 6-01-2022
Perihal : Rapat Evaluasi Rencana Aksi dan Rencana Kerja Triwulan IV Tahun 2021

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	NURHERMAWATI	KASUBAG PROGRAM	1.
2.	HAERUDDIN TATA	SEKRETARIS	2.
3.	Hj. Nurahibah	Kabid. Jukon	3.
4.	SULTAN ARIYAD	Kasi pd. PR	4.
5.	SAPRI		5.
6.	ILHAM	KABID P. RENCANA	6.
7.	M. Ridwan Jayu	Kasi Pelaksana SDA	7.
8.	HAERUDDIN	Kasi OP SDA	8.
9.	AKMAL	Revisi Jaga Konstruksi	9.
10.	MAK MUR	Pemateri Ruang	10.
11.	SAMSU ALAM	Kasi BM	11.
12.	Nifa	Staf Umum	12.
13.	MURPAH	KASI PENGAWASAN	13.
14.	HERMAN HATTA	Jabfun CK	14.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ALAMAT : JALAN LAMATTI NO. 1 TELP. (0402) 21040 - 21400 SINJAI 92013

15.	AZHAR	Ikari Plp	15.	
16.	NURHERMAWATI	KASUBAG PROGRAM	16.	
17.			17.	
18.			18.	
19.			19.	
20.			20.	
21.			21.	
22.			22.	
23.			23.	
24.			24.	
25.			25.	
26.			26.	
27.			27.	
28.			28.	

Sinjai,

Mengetahui,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang Kabupaten Sinjai

Notulis,


Nurhermawati, ST
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19750729 200604 2 022


Ir. Andi Taufiq Saleh, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010

BERITA ACARA

PELAKSANAAN RAPAT EVALUASI RENCANA AKSI/RENCANA KERJA TRIWULAN IV TAHUN 2021

Pada hari ini Rabu tanggal 5 Bulan Januari tahun 2022 bertempat di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai, telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Rencana Aksi/Rencana Kerja Triwulan IV, Rapat Evaluasi Rencana Aksi/Rencana Kerja Triwulan IV ini dipimpin oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan diikuti oleh Para Pejabat Eselon III, IV, dan staf yang terkait dalam pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, dengan hasil rapat sebagai berikut :

1. Rapat ditunda sampai besok dengan menyelesaikan laporan kinerja sesuai format yang diminta.

Demikian hasil sementara Rapat Evaluasi Rencana Aksi/Rencana Kerja Triwulan IV untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Nazaruddin Taha, ST.	Sekretaris Dinas	
2.	M.Nur Badri Hatta, ST, M.Eng.	Kabid. SDA	
3.	Hj. Nurasibah, S.Sos., MM.	Kabid. Jasa Konstruksi	
4.	Ilham, ST.	Kabid. Penataan Ruang	
5.	M.Ridwan Jaya, ST., MM.	Teknik Pengairan Ahli Muda	
6.	Haeruddin, SE.	Teknik Pengairan Ahli Muda	

7.	H. Abd. Asis, ST.	Teknik Pengairan Ahli Muda	
8.	Makmur Wahab, S.Sos.	Penata Ruang Ahli Muda	
9.	Sultan Arsyad, S.Sos.	Penata Ruang Ahli Muda	
10.	Azhar, S.Sos.	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	
11.	Herman Hatta, ST.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	
12.	Rustan Efendi, ST.	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	
13.	Rosmawati, S.Sos.	Kasubbag. Keuangan	
14.	Nurfah, S.Sos.	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	
15.	Edy Hafil, SE.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	
16.	Weni Oktaviana, S.Sos.	Bendahara	
17.	Nurhermawati, ST.	Kasubbag. Program	



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Lamatti No. 1 Kelurahan Bongki Kabupaten Sinjai
Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92615 Telp (0482) 21049 Fax (0482) 21490

NOTULEN RAPAT

EVALUASI RENCANA AKSI/RENCANA KERJA TRIWULAN IV TAHUN 2021

Hari/Tanggal : Rabu, 5 Januari 2022

Pukul : 09.30 Wita s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab. Sinjai

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai

Pemimpin Rapat : Kepala Dinas

Moderator : Sekretaris Dinas

Notulis : Kasubbag. Program

Peserta Rapat :

1. Kabid. SDA
2. Kabid. Jasa Konstruksi
3. Kabid. Penataan Ruang
4. Teknik Pengairan Ahli Muda (Ridwan Jaya, ST., MM.)
5. Teknik Pengairan Ahli Muda (Haeruddin, SE.)
6. Teknik Pengairan Ahli Muda (H. Abd. Asis, ST.)
- 7.. Penata Ruang Ahli Muda (Makmur Wahab, S.Sos.)
8. Penata Ruang Ahli Muda (Sultan Arsyad, S.Sos.)

9. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda (Azhar, S.Sos.)
10. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Herman Hatta, ST.)
11. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Rustam Efendi, ST.)
12. Kasubbag. Keuangan
13. Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Nurfah, S.Sos.)
14. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
15. Bendahara

Materi Rapat:

1. Masing- masing PPK/PPTK mengkroscek kembali laporan capaian kinerja yang telah disampaikan ke Sub. Bagian Program.
2. Para PPK/PPTK menjelaskan capaian kinerja sampai triwulan IV, serta menjelaskan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan.
3. Capaian Kinerja yang dilaporkan bukan banyaknya paket yang dikerjakan melainkan volume pelaksanaan pekerjaan sesuai indikator pada masing-masing kegiatan.

Rapat diawali sambutan oleh Sekretaris Dinas selaku Moderator untuk melaksanakan rapat yang akan membahas evaluasi program kegiatan tahun 2021 dan mempersilahkan kepada Pemimpin Rapat dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara Rapat Evaluasi Rencana Aksi/Rencana Kerja Triwulan IV Tahun 2021.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pemimpin Rapat membuka acara mengatakan bahwa:

Para Pengelola kegiatan untuk hadir sehingga bisa menyampaikan

pelaksanaan kegiatan di tahun 2021 dan menjelaskan apa-apa yang yg menjadi kendala dan hambatan dalam penyelesaian pekerjaan. Untuk tahun 2021 di harapkan untuk menjadi pelajaran dan bahan renungan buat kita semua terutama para pengelola kegiatan agar apa-apa yang kita lakukan di 2021 terkait kekurangan itu jadi pembelajaran untuk melakukan perbaikan di tahun 2022 dan mengatakan bahwa tidak ada orang sempurna semua mempunyai kekurangan tapi bagaimana kita bisa meminimalisir dengan melakukan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu dilakukan, dan mencari jalan keluar dalam rangka penyelesaian masalah-masalah. Kepala Dinas menyampaikan syukur Alhamdulillah bahwa kegiatan di tahun 2021 tidak ada yang mengganggu pikiran karena semua kegiatan bisa terlaksana dengan baik dan apa yang sudah dilakukan bisa dinikmati masyarakat..

Selanjutnya Kepala Dinas mengharapkan di tahun 2022 diadakan kembali apel pagi dan meminta para pegawai lingkup Dinas ada perubahan yang signifikan dalam hal disiplin, dan meminta kasubag umum dan kepegawaian untuk kembali mengaktifkan checklock, dan yang ada kepentingan di luar agar menyampaikan kepada atasannya, dan meminta kepada para penanggung jawab kegiatan untuk menyiapkan laporan kegiatan tahun 2021 agar bilamana ada pemeriksaan, data yang kira-kira dibutuhkan sudah tersedia. Sebelum penanggungjawab kegiatan menyampaikan realisasi program/kkegiatan/sub kegiatan Kepala Dinas meminta kasubag program untuk menyampaikan garis besar pencapaian kinerja dinas, karena permintaan data realisasi kinerja yang diminta belum ditindaklanjuti para penanggungjawab kegiatan, maka rapat evaluasi kinerja diskorsing oleh Kepala Dinas dan rapat akan dilanjutkan esok hari

dan meminta para penanggungjawab kegiatan untuk segera menindaklanjuti dengan menyiapkan data sesuai format yang diminta.

Setelah kepala Dinas menyampaikan bahwa rapat akan dilaksanakan kembali esok harinya, maka rapat diambil alih oleh moderator dan memperjelas kembali bahwa rapat diskorsing karena data capaian kinerja belum disampaikan ke sub bagian program sebagai bahan rapat hari ini yang sekaligus menutup acara rapat evaluasi rencana aksi/rencana kerja triwulan IV.

Setelah kepala Dinas menyampaikan bahwa rapat akan dilaksanakan kembali esok harinya, maka rapat diambil alih oleh moderator dan memperjelas kembali bahwa rapat diskorsing karena data capaian kinerja belum disampaikan ke sub bagian program sebagai bahan rapat hari ini yang sekaligus menutup acara rapat evaluasi rencana aksi/rencana kerja triwulan IV tahun 2021.

Sinjai, 5 Januari 2022

PEMIMPIN RAPAT,



Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, ST., MT.

Pangkat: Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19641214 198903 1 010

NOTULIS,



NURHERMAWATI, ST.

NIP. 19750729 200604 2 022

BERITA ACARA

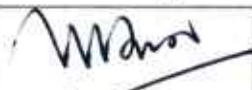
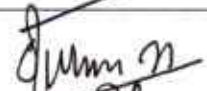

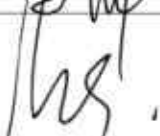

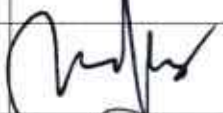





PELAKSANAAN LANJUTAN RAPAT EVALUASI RENCANA AKSI/RENCANA KERJA TRIWULAN IV TAHUN 2021

Pada hari ini Kamis tanggal 6 Bulan Januari tahun 2022 bertempat di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai, telah dilaksanakan kembali Rapat Evaluasi Rencana Aksi/Rencana Kerja Triwulan IV tahun 2021 yang sempat diskorsing karena data capaian untuk bahan evaluasi tidak dipenuhi peserta rapat dalam hal ini para penanggungjawab program/kegiatan/sub kegiatan. Rapat Evaluasi Rencana Aksi/Rencana Kerja Triwulan IV ini dipimpin oleh Sekretaris Dinas sekaligus Moderator dan diikuti oleh Para Pejabat Eselon III, IV, dan staf yang terkait dalam pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, dengan hasil rapat sebagai berikut :

1. Penyampaian laporan Realisasi kinerja dibuktikan dengan data pendukung
2. Penyampaian Laporan berupa Penjelasan penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.

Demikian hasil Rapat Evaluasi Rencana Aksi/Rencana Kerja Triwulan IV untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Nazaruddin Taha, ST.	Sekretaris Dinas	
2.	Muhammad Sabri AR,ST.,MM.	Kabid. Cipta Karya	
3.	Hj. Nurasibah, S.Sos., MM.	Kabid. Jasa Konstruksi	
4.	Ilham, ST.	Kabid. Penataan Ruang	

5.	M.Ridwan Jaya , ST., MM.	Teknik Pengairan Ahli Muda	
6.	Sultan Arsyad, S.Sos.	Penata Ruang Ahli Muda	
7.	Haeruddin, SE.	Teknik Pengairan Ahli Muda	
8.	Akmal, S.Sos.	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	
9.	Nurfah, S.Sos.	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	
10.	Makmur Wahab, S.Sos.	Penata Ruang Ahli Muda	
11.	Herman Hatta, ST.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	
12.	Azhar, S.Sos.	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	
13.	Samsu Alam, ST.	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	
14.	Nita Septiana, A.Md	Staf Bagian Umum	
15.	Nurhermawati, ST.	Kasubbag. Program	



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Lamatti No. 1 Kelurahan Bongki Kabupaten Sinjai
Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92615 Telp (0482) 21049 Fax (0482) 21490

NOTULEN RAPAT

LANJUTAN EVALUASI RENCANA AKSI/RENCANA KERJA TRIWULAN IV TAHUN 2021

Hari/Tanggal	: Rabu, 6 Januari 2022
Pukul	: 13.30 Wita s/d selesai
Tempat	: Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai
Perangkat Daerah	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai
Pemimpin Rapat	: Sekretaris Dinas
Moderator	: Sekretaris Dinas
Notulis	: Kasubbag. Program
Peserta Rapat	: <ol style="list-style-type: none">1. Kabid. Cipta Karya2. Kabid. Jasa Konstruksi3. Kabid. Penataan Ruang4. Teknik Pengairan Ahli Muda (Ridwan Jaya, ST., MM.)5. Penata Ruang Ahli Muda (Sultan Arsyad, S.Sos.)6. Teknik Pengairan Ahli Muda (Haeruddin, SE.)7. Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Akmal, S.Sos.)

8. Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Nurfah, S.Sos.)
9. Penata Ruang Ahli Muda (Makmur Wahab, S.Sos.)
10. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Herman Hatta, ST.)
11. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda (Azhar, S.Sos.)
12. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Samsu Alam, ST.)
13. Staf Umum

Materi Rapat:

1. Masing- masing PPK/PPTK mengkroscek kembali laporan capaian kinerja yang telah disampaikan ke Sub. Bagian Program.
2. Para PPK/PPTK menjelaskan capaian kinerja sampai triwulan IV, serta menjelaskan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan.
3. Capaian Kinerja yang dilaporkan bukan banyaknya paket yang dikerjakan melainkan volume pelaksanaan pekerjaan sesuai indikator pada masing-masing kegiatan.

Rapat diawali sambutan oleh Sekretaris Dinas selaku Moderator sekaligus pemimpin rapat.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebelum membuka acara rapat terlebih dahulu menyampaikan klu yang sekiranya pak kadis yang membuka acara rapat tpi karena ada acara yang sama pentingnya dihadiri dan meminta untuk diwakilkan untuk membuka rapat yang sempat diskorsing. Dan untuk mempersingkat waktu Pemimpin Rapat mempersilahkan Kepala Bidang atau penanggungjawab kegiatan menyampaikan realisasi kegiatan tahun 2021:

Penyampaian kendala dan permasalahan yang terjadi dalam penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2021:

1. Dari Bapak Muhammad Sabri AR, ST., MM. selaku Kepala Bidang Cipta Karya menjelaskan terkait kegiatan yang ada di Bidanganya:

- Pertama membahas masalah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang indikatornya itu Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan targetnya 100%. Realisasi 84,64%. Penjelasannya bahwa belum mencapai target namun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 9,00%.
- Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di daerah kabupaten, indikatornya Jumlah pembangunan, peningkatan, perluasan, dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum target 1.350 Unit. Realisasi 1.352 unit sesuai target yang telah ditetapkan atau 100%
- Penyusunan rencana kebijakan, strategi dan Teknis SPAM, indikatornya Jumlah dokumen perencanaan pengembangan dan perluasan air minum ada 1 dokumen dan Realisasinya 1 dokumen jadi 100% untuk dokumen perencanaan penyediaan air minum untuk tahun 2022.
- Kegiatan Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan Perkotaan, indikatornya adalah Jumlah peningkatan sistem penyediaan air minum jadi targetnya 1 unit Realisasi 1 Unit penjelasan 100% capaian penyediaan air minum..

- Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah, dengan indikator Persentase rumah tinggal bersanitasi. Target kami 100 % terealisasi 89,00% disini kami dapat jelaskan belum mencapai sasaran namun terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,50%
- Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah Kabupaten /Kota dengan indikatornya Jumlah pembangunan sarana dan prasarana dengan target 802 unit realisasinya 802 unit, terealisasi sebesar 100%.
- Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja, indikatornya Jumlah Sarana dan Prasarana air limbah yang tersedia, target 3 unit, terealisasi 3 unit 100% ketersediaan sarana dan prasarana pengangkutan limbah.'
- Pengelolaan dan Pengembangan sistem drainase, indicator Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat, target 81,43% realisasi 81,43% dari capaian ini didukung oleh kegiatan operasional, optimalisasi drainase berupa saluran beberapa ruas jalan di Kabupaten Sinjai.
- Kegiatan selanjutnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten /Kota, indicator Panjang drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota dalam kondisi baik, target 200 meter realisasi 200 meter jadi ini sesuai dengan target sudah dilaksanakan untuk di tahun 2021, kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan

Operasai dan Pemeliharaan Sistem Drainase dengan indicator Panjang saluran drainase permukiman yang dipelihara, target 200 meter realisasi 200 meter.

- Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, indikatornya adalah Persentase bangunan gedung di wilayah kabupaten/kota dalam kondisi baik serta kesesuaian tertib administrasi tata bangunan, target 100% realisasi 100% ini didukung dengan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung serta pelaksanaan izin mendirikan bangunan
- Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG, indikatornya Jumlah laporan kegiatan Pengawasan dan Penertiban Bangunan di Kabupaten Sinjai dalam setahun, target 2 laporan realisasi tidak ada, karena pada kegiatan ini baru menganggarkan penyusunan Perda Bangunan Gedung.
- Selanjutnya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota, indikatornya yang pertama Jumlah bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya ,target 2 unit realisasi 2 unit sudah sesuai target, sudah melaksanakan dua pembangunan gedung pemerintah. Terus yang kedua indikatornya Jumlah bangunan gedung yang di hibahkan, target 3 unit realisasi 3 unit yaitu pembangunan/rehabilitasi lembaga vertikal, yaitu kejaksaan, kepolisian dan kodim. Indikator yang ketiga adalah

Jumlah Sarana infrastruktur peridabatan yang terbangun, target 1 unit realisasi 1 unit, capaian 100% dan diakomodir dalam SK parsial izin bangunan Islamic Center

- Kegiatannya selanjutnya Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/ Kota, indikatornya adalah Jumlah dokumen teknis HSBGN, targetnya 1 dokumen realisasi 1 dokumen jadi 100% terealisasi sampai dengan semester 2.

2. **Dari Ibu Hj. Nurasibah, S.Sos.,MM.** selaku Kepala Bidang Jasa Konstruksi menjelaskan terkait kegiatan yang ada di Bidanganya:

- Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan indicator Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 12,14% terealisasi 9,33%, Rendahnya capaian kinerja program disebabkan karena Kebutuhan tenaga kerja konstruksi untuk pembangunan infrastruktur sangat besar setiap tahunnya untuk membantu program pembangunan infrastruktur meskipun telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dimana target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu Jumlah pelatihan tenaga terampil sebanyak 2 Kali dengan peserta 100 orang dimana dari 100 orang tersebut hanya 96 orang yang lulus sertifikasi.
- Kemudian Dukungan/Fasilitas Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional untuk tahun ini ditargetkan 20 yang dikeluarkan rekomendasi tapi hanya terealisasi 1

Rekomendasi, rendahnya capaian pada indikator ini disebabkan karena Terbitnya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait penghentian penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUK) dan Adanya Perubahan anggaran tidak dibarengi dengan perubahan target kinerja.

3. Dari Bapak Samsu Alam.ST. dengan jabatan baru sebagai Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda mewakili kepala Bidang Bina Marga menjelaskan terkait kegiatan yang ada di Bidangnya:

- Program Penyelenggaraan Jalan dengan indikator Rasio kemantapan jalan kabupaten dengan target 0,5379 Angka atau Persentase kemantapan jalan sebesar 53,79%)teralisasi sebesar 0,5694 Angka atau Persentase kemantapan jalan sebesar 56,94%. Peningkatan dari capaian indikator tersebut ini didukung dengan adanya kegiatan penyelenggaraan jalan pada beberapa ruas jalan kewenangan kabupaten yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sub bidang jalan, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2021.
- Kegiatan yang pertama Pengelolaan Leger Jalan target tahun 2021 dengan indikator kinerja Jumlah pemeliharaan PJU sebanyak 568 Buah dan hanya terealisasi sebanyak 352 Buah, hal ini disebabkan karena adanya pembelian lampu jalan yang tidak drealisasikan.
- Rekonstruksi jalan dengan target kinerja Panjang Jalan yang dikerjakan 28,79 Km ini terealisasi sepanjang 22,805 Km hal

ini disebabkan karena ada refocusing anggaran khususnya Dana yang bersumber dari DID sebesar 30% tidak dibarengi dengan penurunan target panjang jalan yang dikerjakan.

- Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang dipelihara 7 Km dan terealisasi sepanjang 8,88 Km.
- Pembangunan Jembatan target Jumlah Jembatan yang Dibangun dan Direhabilitasi Berat sebanyak 1 Buah jembatan dan terealisasi sesuai target atau capain sebesar 100%.
- Pemeliharaan Rutin Jembatan dengan target indikator kinerja Jumlah Jembatan yang Dipelihara dan terealisasi sebanyak 46 Buah jembatan yang dipelihara hal ini disebabkan karena adanya perubahan penanganan dalam kegiatan pemeliharaan.

4. **Dari Bapak Ridwan Jaya, ST., MM.** dengan jabatan baru sebagai Teknik Pengairan Ahli Muda mewakili Kepala Bidang Sumber Daya Air menjelaskan terkait kegiatan yang ada di Bidanganya:

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan indikator kinerja Persentase Irigasi kabupaten Dalam Kondisi Baik dengan target sebesar 73,56% terealisasi sebesar 73,60%, hal ini disebabkan karena didukung dengan adanya kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada beberapa Daerah Irigasi kewenangan kabupaten yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sub bidang irigasi dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2021.

- Kegiatan untuk Bidang SDA. Untuk kegiatan Pertama Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota. Sub. Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota, Indikatornya Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi untuk kegiatan ini target sudah tercapai 100%
- Kegiatan kedua Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub. Kegiatannya yaitu Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa, Indikatornya Jumlah Dokumen Perencanaan Jaringan Irigasi sudah terealisasi semuanya dan dokumennya sudah siap
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Indikatornya Panjang Irigasi yang Ditingkatkan/Direhab targetnya 17.376 Meter, realisasi 18.712 Meter melebihi target ini disebabkan karena adanya tambahan anggaran di perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

5. **Dari Bapak Ilham, ST.** selaku Kepala Bidang Penataan Ruang menjelaskan terkait kegiatan yang ada di Bidanganya:

- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan target indicator kinerja Ketaatan Terhadap RT/RW 100% dan terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan.

- Kegiatan yang pertama Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten /Kota, indikatornya Jumlah dokumen RTRW/RRTR yang disusun/ditetapkan, Sub. Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang, Indikatornya Jumlah lokasi pemeliharaan RTH taman kota di Kabupaten Sinjai, targetnya sudah terealisasi 100% Pada kegiatan ini tidak menargetkan dokumen meskipun ada sub kegiatan yang dilaksanakan yang bisa menunjang pencapaian target, hal ini disebabkan karena pada saat melakukan pemutakhiran kegiatan dari Permendagri 13 Tahun 2010 ke permendagri NO.90 Tahun 2019 ada kegiatan yang dimutakhirkan tidak sesuai dengan keluaran sub kegiatan tetapi karena kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan dan hanya sub kegiatan ini yang dianggap bisa mengcover kegiatan tsb.
- kegiatan Sistem informasi Penataan Ruang, indikatornya Jumlah dokumen kawasan yang dipetaka secara detail realisasinya 100%
- Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang, indikatornya Jumlah rekomendasi kesesuaian pemanfaatan ruang target 12 Rekomendasi yang tercapai 14 Rekomendasi.

Setelah semua penanggungjawab kegiatan menjelaskan realisasi dan kendala dalam pencapaian target, maka rapat diambil alih kembali oleh moderator sekaligus pemimpin rapat dan sebelum menutup acara rapat, pemimpin rapat kembali meminta kepada para penanggungjawab program/kegiatan/sub kegiatan agar menyampaikan laporan realisasi dan kendala yang dihadapi dan alternative solusi yang telah dilakukan dalam

pencapaian kinerja di tahun Anggaran 2021 secara tertulis dan disetor di sub bagian program.

Sinjai, 6 Oktober 2021

PEMIMPIN RAPAT,



NAZARUDDIN TAHA, ST.

NIP. 19720128 200312 1 003

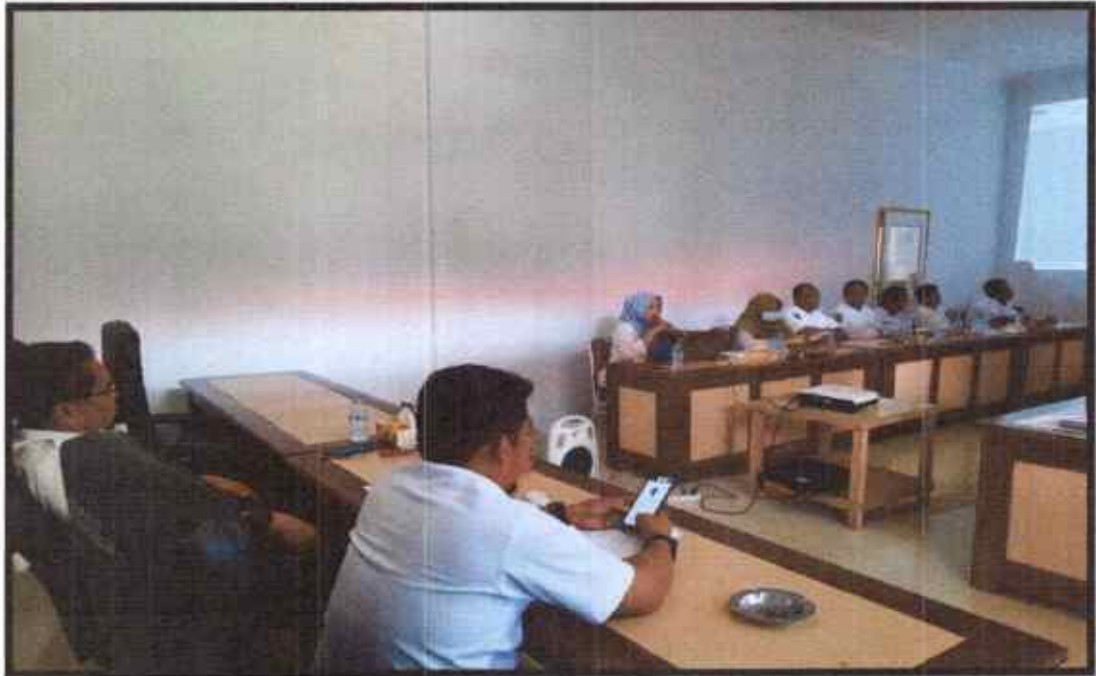
NOTULIS,



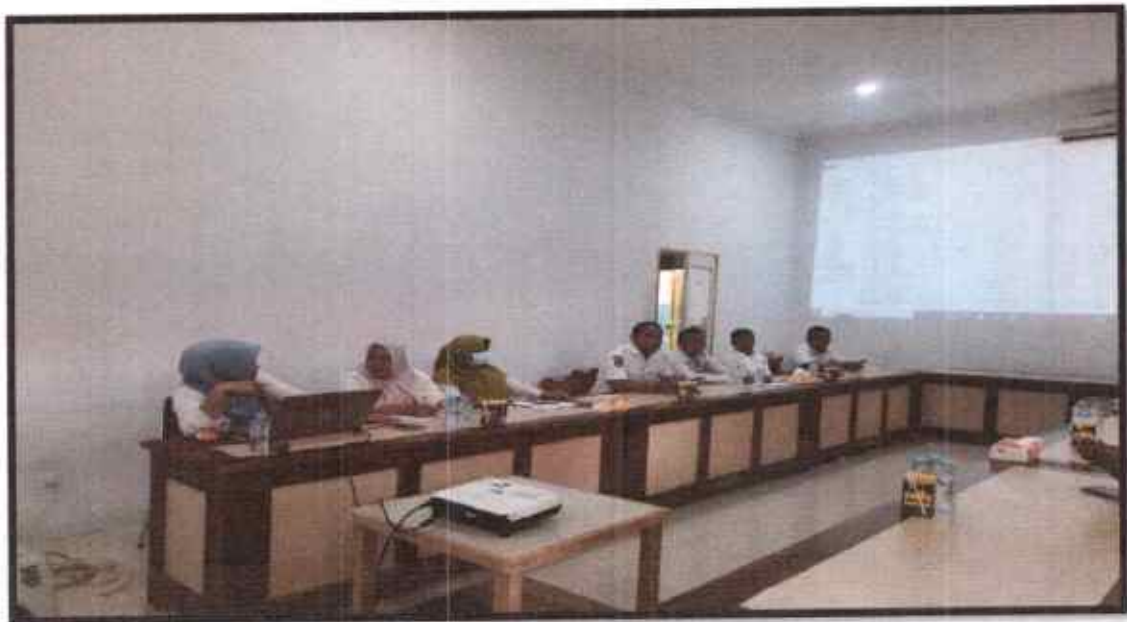
NURHERMAWATI, ST.

NIP. 19750729 200604 2 022

DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN IV TAHUN 2021



DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN IV TAHUN 2021



DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN IV TAHUN 2021 (RAPAT LANJUTAN)



DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN IV TAHUN 2021



DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN IV TAHUN 2021

